

STRATEGI BADAN PERENCANAAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Wiwi Soliha

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon Cirebon, Indonesia

E-mail : wiwisoliha064@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Bappeda selaku badan perencana pembangunan daerah, secara normatif sudah sesuai dengan fungsi dan tugas dalam menyusun RPJMD, melakukan koordinasi antara Dinas-dinas dan Instansi terkait serta menyelenggarakan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten guna untuk menjangkau aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Akan tetapi, dalam proses perencanaan pembangunan daerah tentang Infrastruktur Jalan agar lebih merata dan berkembang disetiap wilayah Kabupaten Indramayu.

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi badan perencanaan daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang di kumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian: Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, pengelolaan Pembangunan Daerah yang baik dan efektif dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indramayu sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur perencanaan bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. perencanaan pembangunan daerah.

Kesimpulan: Bappeda selaku badan perencana pembangunan daerah, secara normatif sudah sesuai dengan fungsi dan tugas dalam menyusun RPJMD, melakukan koordinasi antara Dinas-dinas dan Instansi terkait serta menyelenggarakan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten guna untuk menjangkau aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Akan tetapi, dalam proses perencanaan pembangunan daerah tentang Infrastruktur Jalan agar lebih merata dan berkembang disetiap wilayah Kabupaten Indramayu

Kata Kunci: *Strategi bappeda, Perencanaan dan Pembangunan, Infrastruktur Wilayah*

Abstract

Background: Regional Planning and Development Agency as a regional development planning body, normatively is in accordance with its functions and duties in preparing the RPJMD, coordinating between related agencies and institutions and organizing Musrenbang from the village/kelurahan, sub-district to district levels in order to capture community aspirations and involve community in the regional development process. However, in the regional development planning process regarding Road Infrastructure to be more evenly distributed and developed in every area of Indramayu Regency.

Research objective: This study aims to analyze the strategy of regional planning agencies in the development of road and bridge infrastructure to increase economic growth

Research method: This study uses qualitative methods, data collected by means of interviews, observation and documentation which are then analyzed by descriptive analysis method.

Research results: According to Permendagri No. 86 of 2017 concerning Procedures for Regional Development Planning, good and effective management of Regional Development can increase the rate of economic growth and community welfare. For this reason, the Government through the Regional Planning and Development Agency of Indramayu Regency as part of the Regional Apparatus Organization is a planning element for regional government administrators and has the task of assisting the Governor in the preparation and implementation of regional policies. regional development planning.

Conclusion: Bappeda as a regional development planning body, normatively is in accordance with its functions and duties in preparing the RPJMD, coordinating between related agencies and agencies and organizing Musrenbang from the village/kelurahan, sub-district to district levels in order to capture community aspirations and involve the community in the regional development process. However, in the process of regional development planning regarding Road Infrastructure so that it is more evenly distributed and developed in every area of Indramayu Regency

Keywords: *Bappeda Strategy, Planning and Development, Regional Infrastructure*

Diterima: 25-12-2019 Direvisi: 5-01-2020 Disetujui: 6-01-2020

PENDAHULUAN

Salah satu diantara negara-negara yang sedang berkembang adalah Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan

	Wiwi Soliha (2020) Strategi Badan Perencanaan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. <i>Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan</i> Volume 11, Number 1, Januari, 2022 (37-41)
How to cite:	
E-ISSN:	2809-8862
Published by:	https://greenpublisher.id/

keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945 (Chodijah, 2017). Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana (Effendi & Hendarto, 2013)

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (Gazali, 2017). Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Untuk mendorong kesatuan ekonominya maka pemerintah diharapkan mampu menetapkan program pemerataan pembangunan berskala nasional yang mencakup semua wilayah (HANIFFUDIN, 2019). Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pembangunan nasional disokong oleh unsur-unsur pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan membangun Indonesia dari desa, karena kemajuan desa sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian di Indonesia (Hasuti, 2016).

Era reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah memberikan ruang yang luas pada daerah untuk terus berkembang dan memanfaatkan potensi wilayah untuk memakmurkan masyarakatnya. Jika kita berbicara masalah pembangunan maka kita tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan 2 Satria, dkk. (2011:232) bahwa "Pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak terkecuali pembangunan pertanian dan pedesaan." Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya (Hidayat et al., 2000).

Maka arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dapat kita lihat pada salah satu poin arah kebijakan adalah menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya. Kebijakan infrastruktur dapat dijadikan strategi induk oleh pemerintah, yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian (Kasmira et al., 2020). Pemerintah menggiatkan perhatian publik terhadap infrastruktur, sekaligus melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur. Namun, masalahnya adalah apakah implementasi strategi dan kebijakan tersebut bisa berjalan efektif di lapangan (Kurniadi, 2009)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan judul "Strategi Badan Perencanaan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi".

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian difokuskan pada Kabupaten Indramayu, tepat nya pada kantor badan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah (BAPPEDA) pada 01 september sampai dengan 30 september 2021. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan objek penelitian yang terfokus pada bidang Infrastruktur wilayah. Hasil dari penelitian ini bersumber dari pegawai Dinas Bappeda Indramayu, Pegawai setiap bidang (Bidang perencanaan, bidang infrastruktur wilayah dan bidang ekonomi) Petugas Pendamping PPL, maka di tetapkan informan penelitian ini di tetapkan secara purposive, yaitu penetapan sampel dengan cara menunjukan responden yang di anggap mampu memberikan berbagai data informasi mengenai kinerja pembangunan wilayah oleh bappeda indramayu.

Sumber data atau informan dalam penelitian ini diambil dari berbagai unsur yaitu: Sekertaris bappeda, staf bappeda kabupaten indramayu guna memberikan penilaian terhadap peranan atau kinerja dari BAPPEDA. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi, semua data yang di peroleh akan di analisis dengan cara deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah study kausal yang pada penelitian yang di lakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Dalam hal ini, peneliti menggali sumber data primer dari para informan atau narasumber yang dipilih secara langsung atau purposive sampling, yaitu pejabat pada instansi pemerintahan di Badan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah BAPPEDA, Selain sumber data primer, maka terdapat pula sumber data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.

Kekurangan dari data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluwarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti menggali sumber data sekunder berupa dokumendokumen yang mempunyai relevansinya dengan objek penelitian. Sedangkan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan langkah utama dari penelitian, karena tujuan utama dalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Bappeda dalam pembangunan infrastruktur Jalan

Secara umum proses pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pembangunan selalu diawali dengan adanya ide gagasan untuk membangun, selanjutnya ide ini dituangkan ke dalam konsep pembangunan. Berdasarkan konsep pembangunan dijabarkan ke dalam program pembangunan. Setelah program pembangunan di buat barulah dilaksanakan (Ma' ruf, 2014). Dalam proses pelaksanaan dilakukan monitoring dan pengawasan pembangunan untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan sudah sesuai dengan program yang ada dan apakah pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Secara sistematis dan terencana pembangunan komponen utama dan pendukung pertahanan dan keamanan negara diawali dengan penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berikut adalah beberapa Strategi utama yang perlu dilakukan Bappeda dalam pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan investasi infrastruktur jalan dan jembatan dengan sinergi stakeholder pemerintah, swasta dan masyarakat. Rancangan strategi dan program yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Sinergi pemerintah dan swasta Program kerja sama Corporate Sosial Responsibility (CSR) ditujukan untuk mendorong pihak swasta ikut serta dalam pembangunan jalan dan jembatan yang ada dalam program CSR perusahaan, terutama kerjasama dengan perusahaan yang menyebabkan tingginya tingkat kerusakan jalan dan jembatan dan kemacetan misalnya pertambangan, perumahan dan perusahaan yang bergerak di kawasan industri. Hal ini juga sebagai langkah optimalisasi pembangunan jalan dan jembatan baik fungsi maupun strukturnya karena saat ini masih ada wilayah yang angka rasio jaringan jalan relatif rendah, kurangnya fasilitas jembatan di beberapa wilayah. Menurut (Moerwanto & Junoasmono, 2017) kerja sama antar pihak pemerintah dan swasta penting dilakukan dalam beberapa hal lain yaitu pemeliharaan, perbaikan dan membuka jalan baru. Membangun hubungan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta dilakukan secara bertahap melalui penyusunan peraturan terkait mekanismekerja sama CSR dan adanya sosialisasi terkait peraturan tersebut. Output yang diharapkan adalah peraturan daerah untuk menjadi payung hukum kegiatan yang akan dilaksanakan dan kesepakatan bersama dan melalui nota kesepahaman antara pemerintah dengan pihak swasta dapat untuk ikut serta membangun/memperbaiki jalan dan jembatan yang berhubungan langsung dengan aktivitas bisnis mereka.
2. Sinergi pemerintah dan masyarakat Rentang kebijakan pemerintah terkait infrastuktur harus ada di tiap tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah, investasi di bidang infrastruktur adalah merupakan perpaduan antara kebijakan pemerintah dengan keinginan masyarakat (Pambudy & Syairozi, 2019). Pemerintah Kabupaten Indramayu dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan program investasi infrastruktur yang responsif dan partisipatif. Ada dua program yang dapat diimplementasikan. Pertama, public relation on media social approach, maksud program ini adalah lebih mengefektifkan Subbagian Humas di Dinas BMTR yang bertanggungjawab untuk memberikan informasi ke masyarakat baik informasi, menjawab masukan/saran masyarakat dan menghadapi kritikan melalui media sosial misalnya twitter, facebook dan email. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi rencana lelang atas paket pekerjaan yang akan dilakukan sehingga dapat lebih banyak penyedia barang dan jasa yang berkualitas dapat mengikuti proses lelang sehingga dapat mencegah terjadinya proses lelang berulang kali. Selain itu, perlu mendorong adanya kelembagaan masyarakat jasa konstruksi Provinsi Banten yang terdiri dari masyarakat umum, akademisi, penyedia barang dan jasa dan instansi lain seperti perusahaan utilitas yang terlibat dengan investasi infrastruktur jalan dan jembatan. Ini merupakan upaya peningkatan fungsi Dinas BMTR untuk melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan investasi infrastruktur jalan dan jembatan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan faktor sosial yang mengganggu pelaksanaan kegiatan dapat berkurang.
3. Sinergi antar instansi pemerintah Sinergi antar instansi pemerintah dapat diwujudkan dengan program rapat triwulan antar untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar instansi terkait investasi infrastruktur jalan dan jembatan dan membahas kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat mencegah potensi permasalahan yang timbul dan cepat dalam menangani permasalahan yang terjadi.

B. Fungsi bappeda dalam Perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah yang oleh karenanya menempati posisi yang sangat penting dalam koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan. Landasan hukum lainnya di bidang perencanaan pembangunan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang ini, perencanaan pembangunan diharuskan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah dengan keterlibatan masyarakat.

Perencanaan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya program, rancangan, menyusun konsep, maksud, membuat catatan mengenai pembicaraan dalam rapat, sedangkan perencanaan menurut kamus artinya proses, pembuatan, cara merencanakan. Pemahaman berdasarkan kamus maka perencanaan didefinisikan sebagai penentuan tindakan yang akan dilaksanakan, perencanaan merupakan suatu proses kontinyu dari sebuah rancangan program yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu (Ritonga, 2020).

Selain itu perencanaan menjadi penetapan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi ini menggambarkan suatu sistem perencanaan yang tidak rumit. Definisi perencanaan yang cukup rumit adalah definisinya sebagai berikut perencanaan berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor noncontrollable yang relefan, memperkirakan faktor faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai seta dapat mencari langkah langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Maka perencanaan adalah sebuah teknik, cara untuk mencapai tujuan, tujuan untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh badan perencanaan pembangunan (Suriyani & Keusuma, 2015).

Tujuan tersebut mungkin tercapai sasaran sosial, politik, atau militer, ekonomi, budaya dan religius persoalannya bukan antara rencana dan tidak adanya rencana tetapi persoalannya adalah bagaimana macam-macam rencana itu. Perencanaan pembangunan dengan fokus perhatian bagaimana mengalokasikan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Menurut Widjojo Nitisastro dalam Arsyad, bahwa perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan (Syahza, 2013).

Pembangunan jalan merupakan sebagian dari wewenang penyelenggaraan jalan, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan: (1) perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan; (2)

pengoperasian dan pemeliharaan jalan; dan (3) pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan. Pelaksanaan pembangunan jalan, yang pada umumnya menggunakan dana pemerintah, maka pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pada pasal 3 Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan swakelola dan dengan cara menggunakan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip efektif dan efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan jalan pada dasarnya perlu dilakukan dengan penyedia barang/jasa. Namun demikian pekerjaan-pekerjaan tertentu dapat dilakukan dengan cara swakelola (sebagaimana dijelaskan pada pasal 26 ayat (2) Prepres nomor 54 tahun 2010), baik swakelola yang dilakukan: (1) oleh pengguna anggaran sendiri; (2) oleh instansi pemerintah lain; atau (3) oleh kelompok masyarakat (Warsilan & Noor, 2015).

Dalam proses ini, BAPPEDA Kabupaten Indramayu memiliki peran penting dalam pembangunan jalan raya ataupun pembangunan daerah lainnya seperti berikut ini:

1. RPJPD (25 Tahun Perencanaan)
2. RPJMD (5 Tahun Perencanaan)
3. RKPD (1 Tahun Perencanaan)
4. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi vertikal Daerah-daerah serta Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah
5. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
6. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
7. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah

Adanya peran BAPPEDA sebagai perencanaan pembangunan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika merujuk kepada BAPPEDA sebagai pelaksana maka adanya keikutsertaan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah.

C. Pengaruh Infastruktur Wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi

Di Indonesia, banyak penelitian yang mendalami pengaruh infastruktur terhadap perekonomian dengan hasil yang bervariasi. (Suriani & Keusuma, 2015) menemukan bahwa infastruktur, dalam hal ini listrik dan pendidikan, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, sedangkan variabel jalan dan telepon tidak signifikan. Kebijakan pembangunan infastruktur yang terpusat di Jawa dan Indonesia bagian barat menimbulkan disparitas pendapatan per kapita masing-masing daerah di Indonesia, terutama di Kawasan Indonesia Timur. Lebih lanjut, Yanuar (2006) dengan menggunakan data panel 26 provinsi menunjukkan bahwa modal fisik, infastruktur jalan, telepon, kesehatan, dan pendidikan memberikan pengaruh positif pada output perekonomian. Sementara itu, (Winata et al., 2018) menyimpulkan bahwa listrik, panjang jalan, stok modal, dan otoritas daerah berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi Kawasan Indonesia Barat, sementara variabel air bersih tidak signifikan. Penelitian oleh (Winata et al., 2018) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh ketersediaan infastruktur, di antaranya elektrifikasi, jalan beraspal, dan air bersih.

Upaya pembenahan kondisi infastruktur disadari peran penting dalam mengurangikesenjangan pendapatan dan dampak jangka panjangnya bagi PDB per kapita.5 Perbaikandinfastruktur memiliki kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan diharapkan mampumendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Merujuk pada publikasi World Development Report, infastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayahdengan tingkat ketersediaan infastruktur yang mencukupi. Identifikasi terhadap programpembangunan infastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa pada umumnya programditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dankonektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara). Weil (2009) juga menyatakan bahwa disparitas ketersediaan kapitalfisik dan human capital berperan dalam menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomiantar negara.

Pemimpin Kabupaten Indramayu harus mulai menajaki teknologi dan konsep infastruktur yang modern, terintegrasi dan pintar. Dengan menghadiri Konferensi dan pameran teknologi di seluruh dunia sehingga memiliki pengetahuan dan menimba pengalaman dari berbagai kota di negara lain sehingga akan lebih mudah untuk memulai inisiatif pembangunan. Perbaikan infastruktur akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini serta banyaknya investasi yang masuk akan

KESIMPULAN

Bappeda selaku badan perencana pembangunan daerah, secara normatif sudah sesuai dengan fungsi dan tugas dalam menyusun RPJMD, melakukan koordinasi antara Dinas-dinas dan Instansi terkait serta menyelenggarakan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten guna untuk menjaring aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Akan tetapi, dalam proses perencanaan pembangunan daerah tentang Infastruktur Jalan agar lebih merata dan berkembang disetiap wilayah Kabupaten Indramayu.

Secara umum proses pembangunan infastruktur yang dilaksanakan pembangunan selalu diawali dengan adanya ide gagasan untuk membangun, selanjutnya ide ini dituangkan ke dalam konsep pembangunan. Berdasarkan konsep pembangunan dijabarkan ke dalam program pembangunan. Setelah program pembangunan di buat barulah dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan dilakukan monitoring dan pengawasan pembangunan untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan sudah sesuai dengan program yang ada dan apakah pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayah. Secara sistematis dan terencana pembangunan komponen utama dan pendukung pertahanan dan keamanan negara diawali dengan

penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Perencanaan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya program, rancangan, menyusun konsep, maksud, membuat catatan mengenai pembicaraan dalam rapat, sedangkan perencanaan menurut kamus artinya proses, pembuatan, cara merencanakan. Pemahaman berdasarkan kamus maka perencanaan didefinisikan sebagai penentuan tindakan yang akan dilaksanakan, perencanaan merupakan suatu proses kontinyu dari sebuah rancangan program yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu

BIBLIOGRAFI

- Chodijah, S. (2017). Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Studi Pada Klaster Ekonomi Unggulan Xiv, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan). *Publika*, 5(6).
- Effendi, M., & Hendarto, R. M. (2013). *Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Perekonomian Pulau Madura (Studi Kasus Kabupaten Bangkalan)*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Gazali, M. (2017). Regulasi Dan Strategi Dalam Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dengan Skema Public Private Partnership (Ppp) Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 3(1).
- Haniffudin, H. (2019). *Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Cihonje Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran*. Universitas Siliwangi.
- Hasuti, F. D. (2016). Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(1).
- Hidayat, S., Mulyadi, L., Ghani, Y. A., & Mardiyono, M. (2000). Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Fisik Belajar Dari Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jembatan Suramadu. *Tidak Ada*.
- Kasmira, K., Alyas, A., & Sudarmi, S. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)*, 1(3), 818–833.
- Kurniadi, D. (2009). *Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*. Universitas Diponegoro.
- Ma'ruf, Y. P. (2014). Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Teknik Sipil Usu*, 2(3).
- Moerwanto, A. S., & Junoasmono, T. (2017). Strategi Pembangunan Infrastruktur Wisata Terintegrasi. *Jurnal Hppi (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)*, 3(2).
- Pambudy, A. P., & Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 26–39.
- Ritonga, F. S. (2020). *Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau*.
- Suriani, S., & Keusuma, C. N. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 1–18.
- Syahza, A. (2013). *Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*.
- Warsilan, W., & Noor, A. (2015). Peranan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasi Pada Kebijakan Pembangunan Di Kota Samarinda. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 359–366.
- Winata, O. H., Anwar, S., & Sitorus, H. (2018). Strategi Pembangunan Infrastruktur Fisik Pada Rjpmn 2015-2019 Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara. *Strategi Perang Semesta*, 4(3).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
